

ABSTRAKSI

Didalam Pasal 17 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Ketentuan tersebut telah secara tegas melarang adanya fidusia ulang. Meskipun telah ada ketentuan diatas, didalam prakteknya masih saja ditemui Debitor/Pemberi fidusia yang menjaminkan barang yang sama kepada kreditor lainnya, maka untuk melindungi kepentingan kreditor terhadap debitor nakal tersebut, kemudian diatur ketentuan yang dimuat dalam pasal 28 UUJF.

Jaminan fidusia yang telah didaftarkan membawa konsekuensi bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna asas prioritas pada hak kebendaan dan bagaimana berlakunya asas prioritas pada jaminan fidusia.

Metode penelitan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa makna asas prioritas pada hak kebendaan adalah pemegang jaminan kebendaan yang lahir terlebih dahulu mempunyai kedudukan yang diutamakan dibanding dengan pemegang jaminan kebendaan yang lahir kemudian.

Adapun Fidusia ulang tidak dimungkinkan oleh UUJF, karena atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia. Namun, jika masih saja terjadi adanya 2 perjanjian fidusia atas barang yang sama, maka berdasarkan asas prioritas hak kebendaan dimiliki oleh pihak yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusia pertama kali.

Kata Kunci:

Fidusia Ulang, Asas Prioritas